

# **FILSAFAT PROGRESSIVISME DAN DEMOKRASI PENDIDIKAN (Menggagas Pembelajaran Demokratis)**

**Siswanto**

**Abstrak :** Demokrasi sebagai ungkapan lain dari penghormatan hak-hak asasi manusia, telah diterjemahkan dalam dunia pendidikan, yaitu dengan menciptakan kebebasan intelektual antara pendidik dengan peserta didik dalam proses belajar mengajar. Filsafat progresivisme—yang diklaim sebagai *the liberal road of the culture*—pun mengajarkan agar akal dan kecerdasan peserta didik harus dikembangkan dengan baik, dengan menciptakan suasana yang dialogis, harmonis dan demokratis. Karena sekolah bukan hanya berfungsi sebagai *transfer of knowledge* (pemindahan pengetahuan) akan tetapi juga berfungsi sebagai *transfer of value* (pemindahan nilai), sehingga peserta didik menjadi terampil dan berintelektual baik secara fisik maupun psikis. Kurikulum yang diinginkan bersifat dinamis, fleksibel dan eksperimental.

**Kata kunci :** progressivisme, demokrasi pendidikan, pembelajaran demokratis

## **Pendahuluan**

Satu fenomena penting yang mewarnai transformasi global pada tiga dasawarsa dewasa ini adalah menguatnya tuntutan demokratisasi, khususnya di negara-negara berkembang, termasuk negara yang berpenduduk mayoritas Islam. Demokrasi telah menjadi diskursus yang melibatkan hampir semua komponen masyarakat. Sehingga diskursus-diskursus lain yang melawan kecenderungan ini mau tidak mau mengalami marginalisasi.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Umaruddin Masdar, *Membaca Pikiran Gus Dur dan Amien Rais tentang Demokrasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm.1.

Kuatnya tuntutan demokratisasi dan maraknya diskursus demokrasi<sup>2</sup> tidak lain karena adanya anggapan bahwa demokrasi merupakan suatu sistem yang bisa menjamin keteraturan publik dan sekaligus mendorong transformasi masyarakat menuju suatu struktur sosial, politik, ekonomi dan kebudayaan yang lebih ideal. Ideal dalam arti, manusiawi, *egaliter* dan berkeadilan. Demokrasi yang diyakini sebagai sistem yang paling realistis dan rasional untuk mencegah suatu struktur masyarakat yang dominatif, refresif dan otoritarian.<sup>3</sup>

Kecenderungan dan minat yang sangat kuat terhadap demokrasi dan demokratisasi ini kemudian mendorong hampir semua rezim negara-negara berkembang untuk melakukan reformasi politik dan penyesuaian terhadap tuntutan yang terus meningkat. Walaupun beberapa rezim secara empirik lebih mengedepankan keamanan daripada demokrasi, mereka tetap menggunakan demokrasi sebagai retorika politik untuk mencari legitimasi. Karenanya beberapa rezim otoritarian negara berkembang tetap mengklaim pemerintahannya sebagai penganut sistem demokrasi atau, sekurang-kurangnya, sedang proses ke arah itu.<sup>4</sup>

Meskipun demokrasi sesungguhnya merupakan istilah politik, namun terjemahan dan kongkritisasinya tidak hanya ada di dalam kehidupan politik.<sup>5</sup> Seluruh aspek kehidupan manusia yang

---

<sup>2</sup>Diskursus demokrasi telah melahirkan teoritisasi demokrasi. Korelasi antara diskursus demokrasi dan tuntutan demokratisasi bersifat timbal balik atau saling mempengaruhi kuatnya tuntutan demokratisasi menyebabkan maraknya diskursus demokrasi atau maraknya diskursus telah mendorong dan menyadarkan komponen masyarakat untuk mendukung gerakan pro demokrasi.

<sup>3</sup> Ibid.

<sup>4</sup> Syamsuddin Haris, *Demokrasi di Indonesia: Gagasan dan Pengalaman* (Jakarta: LP3ES, 1995), hlm.3.

<sup>5</sup> Dirunut dari akar katanya, demokrasi berasal dari kata *demos* yang berarti rakyat dan *kratos* yang berarti kekuasaan. Jadi yang dimaksud dengan demokrasi adalah kekuasaan atau UU yang berakar pada rakyat. Dengan demikian--dalam terma politik--dikatakan bahwa kedaulatan tertinggi terletak di tangan rakyat semua. Sedangkan secara terminologi, paling tidak, ada dua pengertian yang berkembang : (1) *Government by the people exercised either directly or through elected representative*, (2) *A social condition of equality and respect for individual within the community*. Lihat William Morris (ed.), *Dictionary of English Language* (New York: Houghton Mifflin Company, 1979), hlm.351. Berdasarkan dua perspektif tersebut,

berhubungan dengan masyarakat luas dan berada dalam sistem kenegaraan membutuhkan demokrasi, karena manusia sebagai hamba Allah butuh dimanusiakan dan dimanusiawikan, sedangkan demokrasi adalah ungkapan lain dari penghormatan hak-hak asasi manusia, suatu sikap hidup insani yang mencerminkan dimiliki dan ditegakkannya peradaban dan kebudayaan.<sup>6</sup>

Sejalan dengan asumsi tersebut, tuntutan demokrasi tidak hanya terarah pada struktur sosial, politik dan ekonomi, tetapi telah memasuki berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk pendidikan. Hal ini dapat dimaklumi karena pendidikan adalah unsur vital dalam setiap masyarakat, terutama masyarakat yang demokratis.<sup>7</sup> Oleh karena itu dalam masyarakat yang demokratis, diharapkan sistem pendidikannya harus demokratis.

Terlepas dari hal tersebut, dunia yang berkembang dewasa ini berevolusi ke arah sistem yang lebih demokratis, tak terkecuali aspek kependidikan Islam. Demokrasi dalam pandangan ini kiranya telah menjelma sebagai tongkat mukjizat yang diharapkan mampu menempatkan masing-masing unsur yang saling berbeda dan beragam proporsinya di dalam lapisan masyarakat yang majemuk.

Tulisan ini – dengan segala keterbatasannya – mencoba untuk menelaah filsafat progressivisme kaitannya dengan demokrasi pendidikan yang pada gilirannya diharapkan dapat diimplementasikan

---

kata demokrasi mempunyai varian makna yang cukup beragam. Namun dalam dunia modern, pengertian demokrasi ditekankan pada makna bahwa kekuasaan tertinggi dalam urusan politik ada di tangan rakyat. Karena itu, dalam wacana politik modern, didefinisikan sebagaimana apa yang dirumuskan negarawan Amerika, Abraham Lincoln, pada tahun 1863, yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat (*government of the people, by the people and for the people*). Artinya, pemerintahan yang dibangun oleh rakyat, pemerintahan yang dibangun atas dasar persekutuan antara individu yang banyak dalam menyalurkan hak-hak kedaulatannya, atau pemerintahan politik bangsa yang melibatkan seluruh rakyat. Lihat Muhsin Khalil, *al-Nazm al-Siyasiyah wa al-Qanun al-Dusturiyah* (Iskandariyah: Al-Ma'arif, 1971), hlm.138.

<sup>6</sup>Syamsul Arifin dan Ahmad Barizi, *Paradigma Pendidikan Berbasis Pluralisme dan Demokrasi, Rekonstruksi dan Aktualisasi Tradisi Ikhtilaf dalam Islam* (Malang: UMM Press, 2001), hlm. 89.

<sup>7</sup>Abdullah Alanudi (ed.), *Apakah Demokrasi itu*, terj. Budi Prayitno (tt:tp, tt), hlm.18.

dalam pembelajaran, baik dalam aspek belajar mengajar di kelas maupun kurikulum.

### **Demokrasi Pendidikan : Proses Humanisasi**

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, demokrasi diartikan sebagai “gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara”.<sup>8</sup> Demokrasi yang ideal adalah pengakuan dan penghargaan terhadap keanekaragaman dan keberbedaan dalam kehidupan pribadi maupun masyarakat. Demokrasi justru ada karena pengakuan terhadap pluralisme, terhadap pendapat yang berbeda dan kesanggupan menyelesaikan konflik untuk tujuan bersama. Demokrasi adalah suatu pola hidup bersama dan akumulasi pengalaman-pengalaman yang terkomunikasikan bersama.<sup>9</sup>

Adapun moment terpenting dari demokrasi adalah kebebasan berbicara dan berkehendak (*freedom of speak and press*).<sup>10</sup> Artinya, dalam tubuh demokrasi tercermin nilai keterbukaan sistem yang menyangkut gabungan kebutuhan naluriah dan pilihan rasional masing-masing individu. Karena itu, di dalam demokrasi ruang lingkup pertukaran ide-ide menjadi semakin luas dan melibatkan semakin banyak unsur yang ada di dalam masyarakat. Dengan perkataan lain, pluralisme dan relativisme kebenaran akhirnya muncul untuk menggantikan absolutisme dan superioritas keserbatunggalan yang kini

---

<sup>8</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm.195. Hal ini memberikan pemahaman bahwa demokrasi merupakan pelaksanaan dan prinsip kesamaan sosial dan tidak adanya perbedaan yang menyolok. Disamping itu, ia menjadi suatu cara hidup (*way of life*) yang menekankan pada nilai individu dan intelegensi. Manusia percaya bahwa dalam berbuat, mereka membutuhkan adanya hubungan sosial yang mencerminkan adanya saling menghormati, kerja sama, toleransi dan *fair play*. Lihat Hasbullah, *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 242.

<sup>9</sup>Wuri Soedjatmiko, “Pendidikan Tinggi dan Demokrasi” dalam *Menggagas Paradigma Baru Pendidikan; Demokratisasi, Otonomi, Civil Society, Globalisasi*, ed. Sindhunata (Yogyakarta: Kanisius, 2000), hlm. 49-50.

<sup>10</sup>Masdar Farid Mas’udi, “Demokrasi dan Islam,” dalam *Agama, Demokrasi dan Transformasi Sosial*, ed. M.Masyhur Amin dan Mohammad Najib (Yogyakarta: LKPSM NU-DIY, 1993), hlm. 4.

tampak lebih menjadi *aus* dan *usang* oleh petasan transformatif sosial budaya dan perubahan masyarakat modern.<sup>11</sup>

Kehidupan demokrasi adalah kehidupan yang menghargai potensi individu, yaitu individu yang berbeda dan individu yang mau hidup bersama. Dengan demikian, segala jenis *homogenisasi* masyarakat yaitu menyamaratakan anggota masyarakat menuju *uniformitas* adalah bertentangan dengan prinsip-prinsip hidup demokrasi. Termasuk di dalamnya pengakuan terhadap hak asasi manusia merupakan inti dari kehidupan demokrasi di dalam segala aspek kehidupan.<sup>12</sup>

Tujuan paling hakiki dari demokrasi, dengan demikian, adalah membentuk sebuah sistem yang apresiatif terhadap hak-hak dasar manusia sebagai makhluk, baik sebagai individu maupun kelompok sosial yang berdaulat dan bermartabat. Demokrasi, baik sebagai sebuah sistem nilai kebudayaan maupun yang termanifestasi dalam struktur masyarakat akan mencegah kekuatan yang otoritarian.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Arifin dan Barisi, *Paradigma Pendidikan*, hlm. 87.

<sup>12</sup> H.A.R. Tilaar, *Paradigma Baru Pendidikan Nasional* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm.11. Sedangkan menurut Abdurrahman Wahid (Gus Dur), demokrasi dilihat dari sifatnya, ada yang bersifat pokok dan ada yang bersifat *derivasi* atau lanjutan dari yang pokok itu. Nilai pokok demokrasi menurutnya adalah kebebasan, persamaan dan musyawarah atau permusyawaratan. Ia juga mengutip pendapat Ali Abd al-Raziq yang menyatakan bahwa inti demokrasi adalah kebebasan, keadilan dan syura. Lihat Abdurrahman Wahid, "Sosialisasi Nilai-nilai Demokrasi," dalam *Agama, Demokrasi dan Transformasi Sosial*, ed. M.Masyhur Amin dan Mohammad Najib (Yogyakarta: LKPSM NU-DIY, 1993), hlm. 89.

<sup>13</sup> Masdar, *Membaca Pikiran*, hlm. 15. Dari segi epistemologi, demokrasi adalah benih dan buah daripada praktek-praktek yang luas dalam intelegensi. Demokrasi adalah usaha mencari nilai-nilai kebenaran, seperti juga proses ilmu pengetahuan dalam mencari kebenaran. Dengan perkataan lain, demokrasi adalah ide-ide, pemikiran-pemikiran yang dilaksanakan dalam pergaulan sosial. Dalam komunikasi sosial, maka esensi fenomena sosial itu ialah demokrasi, dan demokrasi yang telah melembaga merupakan perwujudan dari identitas sosial. Secara aksiologis, demokrasi merupakan nilai instrumental dari nilai intrinsik. Dalam arti ideal, demokrasi adalah jalan menuju kebahagiaan. Demokrasi adalah nilai individual sekaligus sosial. Dengan demokrasi setiap individu memiliki hak asasi, kemerdekaan dan kesempatan untuk mengembangkan kepribadian, *self realization*. Sekaligus dengan demokrasi tiap individu mengemban kewajiban untuk menghormati individu lain, untuk memikul tanggung jawab sosial. Dalam bahasa pragmatisme, "*democracy is symbolic of the*

Dengan demikian, demokrasi pendidikan adalah demokrasi yang memberikan kesempatan pendidikan yang sama kepada semua orang, tanpa membedakan ras (suku), kepercayaan, warna dan status sosial. Definisi ini memberi pengertian bahwa setiap individu mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran.<sup>14</sup> Masing-masing mempunyai hak otonomi untuk mengekspresikan dan mengaktualkan potensi yang dimilikinya melalui pendidikan.<sup>15</sup> Brian Crittenden menyatakan bahwa otonomi individu merupakan nilai yang amat fundamental dalam teori dan praktik pendidikan. Ia menulis :

“Individual autonomy is widely regarded as a fundamental value in educational theory and practice. Supporters of a systemic approach to knowledge in teaching and learning often claim that one of the main outcomes. If not the most important, of the educational process is its contribution of the making of an autonomous person”.<sup>16</sup> (Otonomi individu merupakan pandangan secara luas sebagai nilai dasar (fundamental) dalam teori dan praktik pendidikan. Pendukung-pendukung sebuah pendekatan yang sistematis bagi pengetahuan dalam pengajaran dan pembelajaran sering mengklaim bahwa seseorang merupakan modal utama, jika tidak sangat penting, bagi proses pendidikan adalah kontribusinya tentang sebuah otonomi perorangan).

Kebebasan otonomi bagi masing-masing individu (dalam konteks ini siswa-guru atau dosen-mahasiswa) merupakan cermin landasan moral terciptanya demokrasi pendidikan di lembaga

---

*supreme value of growth*”. Lihat Theodore Brameld, *Philosophies of Education in Cultural Perspective* (New York: Rinehart and Winston, 1955), hlm. 118.

<sup>14</sup> Berkenaan dengan hal tersebut, demokrasi ditunjukkan dengan pemusatan perhatian serta usaha pada peserta didik dalam keadaan yang sewajarnya (inetelgensinya, kesehatannya, keadaan sosial dan sebagainya). Di kalangan Taman Siswa dianut sikap *Tutwuri Handayani*, suatu sikap demokratis yang mengakui haknya untuk tumbuh dan berkembang menurut kodratnya. Lihat Soegarda Poerbakawatja, *Ensiklopedi Pendidikan* (Jakarta: Gunung Agung, 1982), hlm. 69.

<sup>15</sup> Arifin dan Barizi, *Paradigma Pendidikan*, hlm. 90-91.

<sup>16</sup> Brian Crittenden, *Education for Rational Understanding: Philosophical Perspective on the Sty and Practice* ( Victoria: Australian Council for Educational Research, 1981), hlm. 99.

pendidikan, khususnya di perguruan tinggi, - yang kalau boleh penulis – meminjam istilah William Brickman adalah kebebasan akademik, yaitu seorang dosen untuk mengajar,<sup>17</sup> serta hak seorang mahasiswa<sup>18</sup> untuk belajar tanpa adanya pembatasan dan pencampuran dengan hal-hal yang irrasional.<sup>19</sup> Sebab itu, dalam proses dinamis interaksi- edukatif dan tradisi ilmiah siswa dan guru atau mahasiswa dan dosen biasa terjadi suatu konflik atau *ikhtilaf* (perbedaan pendapat). Konflik yang dimaksud di sini, seperti yang dikatakan Soerjanto Poepoeardojo,<sup>20</sup> diambil dalam arti luas dan merupakan sifat intern dalam manusia, yaitu sebagai benturan, *conflictus*, antara dua gagasan yang saling mengasah, sehingga terlahir gagasan lain yang ditingkatkan dalam taraf yang lebih tinggi. Maka ia dianggap sebagai jalan atau sarana untuk melangkah maju. Jadi konflik yang dimaksud bukanlah konflik yang melahirkan permusuhan seperti yang diutarakan Sartre, atau pertentangan kelas seperti yang diajarkan Marx, melainkan secara

---

<sup>17</sup>Kebebasan akademik bagi seorang dosen terbagi ke dalam tiga hal: *pertama*, merdeka untuk mengajarkan pertemuan-pertemuan ilmiah, serta pandangan-pandangannya tentang kebenaran secara jujur. *Kedua*, bebas menyajikan mengenai penemuannya serta penilaiannya segala sesuatu yang berbeda dengan kawasan keahliannya. *Ketiga*, bebas mempublikasikan hasil penelitian dan gagasan-gagasannya agar teman sejawatnya serta masyarakat dapat memetik manfaat dan memberi kritikan atas karyanya tersebut. Lihat Arifin dan Barizi, *Paradigma Pendidikan*, hlm. 94.

<sup>18</sup>Hal-hal yang berkenaan dengan kebebasan akademik bagi mahasiswa adalah meliputi hak untuk memperoleh pengajaran yang benar, hak untuk membangun pandangannya sendiri atas dasar studi yang dilakukan, hak untuk mendengarkan dan menyatakan pendapat, serta hak untuk menyebarkan hal-hal yang rasional sebagai sebuah dari telaah-telaah yang dilakukannya. Lihat A. Malik Fadjar dan Muhadjir Efendy, *Dunia Perguruan Tinggi dan Kemahasiswaan* (Malang: P3UMM, 1991), hlm.14.

<sup>19</sup> Ibid, hlm.13. Tidak jauh berbeda dengan makna tersebut, Hovde menganggap – sebagaimana dikutip Susanto – perguruan tinggi sebagai pusat kebebasan intelektual, sebagai lembaga yang mendorong untuk belajar, menemukan hal-hal baru, mengajar dan berdiskusi serta memberikan kritikan dimana perlu. Lihat Astrid Susanto, *Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial* (Bandung: Bina Cipta, 1976), hlm. 282.

<sup>20</sup>Soerjanto Poepoeardojo, *Strategi Kebudayaan: Suatu Pendekatan Filosofis* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993), hlm. 51.

dialektis dalam hubungan interaksi-edukatif menuju kesempurnaan akademik (intelektual).<sup>21</sup>

Karena itulah, demokrasi pendidikan dalam pengertian yang lebih luas, patut selalu dianalisis dan dirumuskan sebagai proses humanisasi. Humanisasi pendidikan akan menumbuhkan pemberdayaan manusia dan masyarakat melalui ilmu pengetahuan dan menempatkan kesadaran sebagai hasrat (*intention*) terhadap dunia, yang pada gilirannya akan mendinamisasikan perkembangan ilmu pengetahuan.<sup>22</sup> Sehingga pendidikan bukan hanya sekadar menghidupi peserta didik tetapi mengembangkannya sebagai manusia (*human being*). Pendidikan bukanlah bertujuan untuk melahirkan robot-robot yang hanya menerima petunjuk dan arahan, tetapi pendidikan yang mengembangkan pribadi-pribadi yang kreatif, kritis dan produktif.<sup>23</sup>

Friere,<sup>24</sup> menyarankan upaya mencapai demokrasi pendidikan yang berwawasan humanis adalah dengan menciptakan kebebasan intelektual antara pendidik dengan peserta didik dalam proses belajar mengajar. Proses tersebut harus terbuka, penuh dialog dan bertanggung jawab antara pendidik dan peserta didik dan interaksi antara mereka dalam bentuk egaliter dan kesetaraan (*equity*). Dengan adanya kesetaraan (*equity*), kebebasan berinisiatif, berbeda aspirasi dan pendapat serta keadilan dalam pendidikan akan terakomodasi dengan baik, sebab pendidikan memang merupakan sarana terpenting untuk mencapai kemerdekaan.<sup>25</sup> Dalam konteks ini, desain demokrasi pendidikan harus terjadi ke segala arah dan bukan hanya bersifat satu arah, yaitu dari pendidik ke peserta (*top down*) melainkan juga ada keseimbangannya, yaitu dari peserta didik dengan pendidik (*bottom up*) dan antar peserta didik (*network*).

---

<sup>21</sup> Arifin dan Barizi, *Paradigma Pendidikan*, hlm. 95.

<sup>22</sup> Paulo Friere, *Politik Pendidikan, Kebudayaan, Kekuasaan dan Pembebasan*, terj. Agung Prihantoro dan Fuad Arif Fudiyartanto (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 191.

<sup>23</sup> H.A.R. Tilaar, *Paradigma Baru Pendidikan nasional* (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm.12.

<sup>24</sup> Paulo Friere, *Pendidikan sebagai Praktik Pembebasan* (Jakarta: Gramedia, 1984), hlm. 24.

<sup>25</sup> Hujair AH. Sanaky, *Paradigma Pendidikan Islam, Membangun Masyarakat Madani Indonesia* (Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2003), hlm. 243.

### Deskripsi Singkat tentang Filsafat Progressivisme

Progressivisme merupakan aliran filsafat yang lahir di Amerika Serikat sekitar abad ke-20. John S. Brubacher, mengatakan bahwa filsafat progressivisme bermula pada aliran filsafat pragmatisme yang diperkenalkan oleh William James (1842-1910)<sup>26</sup> dan John Dewey (1859-1952)<sup>27</sup>, yang menitikberatkan pada segi manfaat bagi hidup praktis. Dan dalam banyak hal progressivisme identik dengan pragmatisme. Oleh karena itu apabila orang menyebut pragmatisme, maka berarti sama dengan progressivisme.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Harun Hadiwijono, *Sari Sejarah Filsafat Barat 2* (Yogyakarta: Kanisius, 1980), hlm. 130. Ia adalah seorang Psikolog dan seorang filosof Amerika yang paham, ajaran dan kepribadiannya sangat berpengaruh di berbagai negara Eropa dan Amerika. Meskipun demikian, ia sangat terkenal di kalangan umum Amerika sebagai penulis yang brilian, dosen serta penceramah di bidang filsafat, juga terkenal sebagai pendiri pragmatisme. James berkeyakinan bahwa otak atau pikiran, seperti juga aspek dari eksistensi organik, harus mempunyai fungsi biologis dan nilai kelanjutan hidup. Ia juga menegaskan agar fungsi otak dan pikiran itu dipelajari sebagai bagian dari mata pelajaran pokok dari ilmu pengetahuan alam. Jadi, James menolong untuk membebaskan ilmu jiwa dari prakonsepsi teologis, dan menempatkannya di atas dasar ilmu perilaku. Lihat Jalaluddin dan Abdullah Idi, *Filsafat Pendidikan; Manusia, Filsafat dan Pendidikan* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), hlm. 70.

<sup>27</sup>Dewey mengembangkan pragmatisme dalam bentuknya yang orisinal, tetapi meskipun demikian, namanya sering pula dihubungkan terutama dengan *instrumentalisme*. Adapun ide filsafatnya yang utama berkisar problema pendidikan yang konkrit, baik teori maupun praktik. Dan reputasi internasionalnya terletak pada sumbangan pikirannya terhadap filsafat pendidikan *progressivisme* Amerika. Dewey tidak hanya berpengaruh dalam kalangan ahli filsafat profesional, akan tetapi juga karena perkembangan idenya yang fundamental dalam bidang ekonomi, hukum, antropologi, teori politik dan ilmu jiwa. Dia adalah juru bicara yang sangat terkenal di Amerika Serikat dari cara-cara kehidupan demokratis.

<sup>28</sup>H. Ali, *Filsafat Pendidikan* (Yogyakarta: Kota Kembang, 1990), hlm. 297. Kesamaan ini berangkat dari keyakinan Pragmatisme bahwa akal manusia aktif dan selalu ingin meneliti, tidak pasif dan tidak begitu saja menerima pandangan tertentu sebelum dibuktikan kebenarannya secara empiris. Lihat Uyoh Sadulloh, *Pengantar Filsafat Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2003), hlm.120. Disamping itu, progressivisme dinamakan *instrumentalisme*, karena aliran ini beranggapan bahwa kemampuan intelegensi manusia sebagai alat untuk hidup, untuk kesejahteraan, untuk mengembangkan kepribadian manusia. Demikian juga dinamakan *eksperimentalisme*, karena aliran tersebut menyadari dan mempraktikkan asas eksperimen yang merupakan untuk menguji kebenaran suatu teori. Progressive juga dinamakan *environmentalisme* karena aliran ini menganggap lingkungan hidup itu mempengaruhi

Filsafat Progressivisme tidak mengakui kemutlakan kehidupan, menolak absolutisme dan otoriterisme dalam segala bentuknya, nilai-nilai yang dianut bersifat dinamis dan selalu mengalami perubahan, sebagaimana dikembangkan oleh Immanuel Kant, salah seorang penyumbang pemikir pragmatisme-progressivisme yang meletakkan dasar dengan penghormatan yang bebas atas martabat manusia dan martabat pribadi.<sup>29</sup> Sehingga filsafat ini menjunjung tinggi hak asasi individu dan menjunjung tinggi nilai demokratis.

Oleh karena itu, filsafat progressivisme ini dianggap sebagai *the liberal road of the culture* (kebebasan mutlak menuju ke arah kebudayaan), maksudnya nilai-nilai yang dianut bersifat fleksibel terhadap perubahan, toleran dan terbuka (*open minded*), dan menuntut pribadi-pribadi penganutnya untuk selalu bersikap menjelajah, meneliti, guna mengembangkan pengalamannya. Mereka harus memiliki sikap terbuka dan berkemauan baik sambil mendengarkan kritik dan ide-ide lawan sambil memberi kesempatan kepada mereka untuk membuktikan argumen tersebut.<sup>30</sup>

Lebih dari itu, filsafat ini menaruh kepercayaan terhadap kekuatan alamiah manusia, kekuatan yang diwarisi manusia sejak lahir (*man's natural powers*), yakni manusia sejak lahir telah membawa bakat dan kemampuan (*predisposisi*)<sup>31</sup> atau potensi (kemampuan) dasar terutama daya akalnya sehingga dengan daya akalnya manusia akan dapat mengatasi segala problematika hidupnya, baik tantangan, hambatan, ancaman maupun gangguan yang timbul dari lingkungan hidupnya.<sup>32</sup>

Sehubungan dengan itu, Wasty Soemanto<sup>33</sup> menyatakan bahwa daya akal sama dengan inetelegensi di mana intelegensi menyangkut kemampuan untuk belajar dan menggunakan apa yang telah dipelajari

---

pembinaan kepribadian. Lihat Noorsyam, *Filsafat Pendidikan dan Dasar Filsafat Pancasila* (Surabaya: Usaha Nasional, 1988), hlm. 228-229.

<sup>29</sup> Zuhairini, *Filsafat Pendidikan Islam* (Jakarta: Bina Aksara, 1991), hlm.21.

<sup>30</sup> M. Arifin, *Filsafat Pendidikan Islam* (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm. 183-184.

<sup>31</sup> Imam Barnadib, *Filsafat Pendidikan* (Yogyakarta: FIP-IKIP, 1985), hlm. 28.

<sup>32</sup> Mansur Isna, *Diskursus Pendidikan Islam* (Yogyakarta: Global Pustaka Utama, 2001), hlm. 153.

<sup>33</sup> Wasty Soemanto, *Psikologi Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), hlm.100-101.

dalam usaha penyesuaian terhadap situasi-situasi yang kurang dikenal atau dalam pemecahan masalah. Di sini tersirat bahwa intelegensi merupakan kemampuan *problem solving* dalam segala situasi baru atau yang mengandung masalah.

Dengan demikian, progressivisme menunjukkan bahwa kecerdasan adalah potensi pada manusia yang sangat membedakannya dengan makhluk lain.<sup>34</sup> Hendaknya peserta didik dipandang tidak hanya sebagai kesatuan rohani dan jasmani saja melainkan juga manifestasinya sebagai tingkah laku dan perbuatan yang berada dalam pengalamannya. Jasmani dan rohani serta kecerdasannya perlu difungsikan dalam arti peserta didik berada aktif dalam memanfaatkan sepenuhnya lingkungan sekitarnya.<sup>35</sup>

### **Pembelajaran Demokratis : Tataran Implementatif**

Progressivisme menghendaki pendidikan yang pada hakikatnya progresif dan pengalaman merupakan salah satu kunci untuk menguasai pengetahuan. Upaya pendidikan ditujukan untuk merekonstruksi pengalaman sebanyak-banyaknya dan melatih kemampuan berfikir dengan memberikan stimulus (rangsangan),<sup>36</sup> sehingga peserta didik dapat berbuat sesuatu yang inteligen dan mampu mengadakan penyesuaian sesuai dengan tuntutan lingkungan.<sup>37</sup>

Aliran ini pun menggarisbawahi kecerdasan manusia sebagai suatu potensi yang besar, yang menyebabkannya menjadi makhluk pendidikan. Dengan kecerdasan yang cukup manusia mampu untuk mengetahui hubungan faktor-faktor dan problema satu sama lain.

---

<sup>34</sup> Imam Barnadib, *Filsafat Pendidikan, Suatu Tinjauan* (Yogyakarta: Andi Offset, 1986), hlm. 38.

<sup>35</sup> Isna, *Diskursus Pendidikan*, hlm. 154.

<sup>36</sup> Pendidikan sebagai wahana yang paling efektif dalam melaksanakan proses pendidikan tentulah berorientasi kepada sifat dan hakikat peserta didik sebagai manusia yang berkembang. Usaha-usaha yang dilakukan adalah bagaimana menciptakan kondisi edukatif, memberikan motivasi-motivasi dan stimuli-stimuli sehingga akal dan kecerdasan peserta didik dapat difungsikan dan berkembang dengan baik.

<sup>37</sup> Muhaimin, *Wacana Pengembangan Pendidikan Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 41.

Dengan kecerdasan orang mampu memikirkan sesuatu dengan benar dan tepat.<sup>38</sup>

Akal dan kecerdasan peserta didik harus dikembangkan dengan baik. Karena sekolah bukan hanya berfungsi sebagai *transfer of knowledge* (pemindahan pengetahuan) akan tetapi juga berfungsi sebagai *transfer of value* (pemindahan nilai), sehingga peserta didik menjadi terampil dan berintelektual baik secara fisik maupun psikis. Mereka harus diberi kemerdekaan untuk bersikap dan berbuat sesuai dengan cara dan kemampuannya masing-masing dalam upaya meningkatkan kecerdasan dan daya kreativitasnya.

Kreativitas peserta didik perlu dikembangkan melalui penciptaan situasi proses belajar mengajar yang berpusat pada siswa. Melalui proses belajar seperti itu, dapat ditegakkan pilar-pilar pendidikan yang menyangga proses belajar; mengetahui (*learning to know*), belajar melakukan (*learning to do*), belajar mengenal diri (*learning to be*) dan belajar hidup bersama (*learning to live together*).<sup>39</sup> Dalam konteks ini, pendidik berperan mendorong pengembangan segenap potensi peserta didik melalui vitalitas keingintahuan peserta didik untuk mencipta dan memberi fungsi baru sesuai dengan sistem yang ada.<sup>40</sup>

Pendidikan – dalam konteks ini – harus berhubungan secara langsung dengan minat anak, yang dijadikan sebagai dasar motivasi belajar. Sekolah menjadi “*child centered*” dimana proses belajar ditentukan terutama oleh peserta didik. Secara kodrati, anak suka belajar apa saja yang berhubungan dengan minatnya atau untuk

---

<sup>38</sup> Isna, *Diskursus Pendidikan*, hlm. 154.

<sup>39</sup> Hal ini berawal dari asumsi bahwa pendidikan di abad ke-21 diprediksi akan jauh berbeda dari pendidikan yang sekarang. Sehingga UNESCO mulai tahun 1997 sudah mulai menggali kembali dan memperkenalkan *the Four Pillars of Education* tersebut untuk mengantisipasi perubahan yang bukan hanya linier tetapi mungkin eksponensial yang diantisipasi akan terjadi dalam masyarakat yang mengglobal. Keempat kemampuan ini dimulai dari belajar untuk mengetahui. Setelah dapat belajar untuk mengetahui diharapkan dapat menerapkannya. Eksplorasi lebih detail lihat Soedjatmiko, “Pendidikan Tinggi dan Demokrasi,” dalam *Menggagas Paradigma*, hlm.55-58.

<sup>40</sup> A. Malik Fajar, et.al. *Platform Reformasi Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Logos, 2001), hlm. 61.

memecahkan masalahnya. Peserta didik akan mampu melihat relevansi dari apa yang dipelajari terhadap kehidupannya, bahkan juga terhadap konsepsi kehidupan orang dewasa.<sup>41</sup> Karena sejatinya pendidikan adalah proses penyesuaian anak dengan lingkungannya, baik dalam bidang sosial kemasyarakatan, iklim politik dan sebagainya.<sup>42</sup>

Untuk itu diperlukan kurikulum yang berpusat pada pengalaman atau kurikulum ekperimental, dimana apa yang telah diperoleh peserta didik selama di sekolah akan dapat diterapkan dalam kehidupan nyata. Filsafat progresivisme pun menunjukkan dengan konsep dasarnya sejenis kurikulum yang program pengajarannya dapat mempengaruhi anak belajar secara edukatif di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Kurikulum yang diinginkan menggunakan pendekatan interdisipliner. Buku merupakan alat dalam proses pembelajaran, bukan sumber pengetahuan.<sup>43</sup> Tentunya dibutuhkan sekolah yang baik dan kurikulum yang baik pula.<sup>44</sup>

Menurut Iskandar Wiryokusumo dan Usman Mulyadi, sekolah yang baik itu adalah sekolah yang dapat memberikan jaminan para peserta didiknya selama belajar, maksudnya, yaitu sekolah harus mampu membantu dan menolong siswanya untuk tumbuh dan berkembang serta memberi keleluasaan tempat dalam mengembangkan bakat dan minatnya melalui bimbingan guru dan tanggung jawab kepala sekolah. Kurikulum dikatakan baik apabila bersifat fleksibel dan eksperimental<sup>45</sup> atau tipe *core curriculum* dan memiliki peluang-peluang untuk diperiksa setiap saat.<sup>46</sup>

---

<sup>41</sup> Sadulloh, *Filsafat Pendidikan*, hlm. 149.

<sup>42</sup> Robert Maynard Hutchins, "Pendidikan Liberal Sejati", dalam *Menggugat Pendidikan; Fndamentalis Konservatif, Liberal, Anarkis*, terj. Omi Intan Naomi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 109.

<sup>43</sup> Sadulloh, *Filsafat Pendidikan*, hlm. 148.

<sup>44</sup> Barnadib, *Filsafat Pendidikan*, hlm. 29.

<sup>45</sup> Kurikulum yang baik ialah seperti fungsi suatu laboratorium. Ia selalu sebagai rentetan kontinyu suatu eksperimen, dan semua pelakunya, yakni guru bersama siswanya, yang dalam beberapa aspek melakukan ilmiawan. Karena itu, perlu dihindari kurikulum yang kaku, standar yang mekanis, penyelesaian-penyelesaian tradisional. Seperti juga metode-metode eksperimental bersifat lentur, eksploratif, progresif, berhasrat dan berinisiatif mencoba yang belum dicoba, demikian pula sebaiknya materi kurikulum dan metode pengajaran. Kurikulum progressivisme

Progressivisme menghendaki bentuk yang bervariasi dan isi kurikulum yang kaya. Aliran ini tetap memerlukan suatu perencanaan pendidikan dan kurikulum tetapi atas prinsip-prinsip yang dinamis, buka pola-pola statis. Apa yang mereka butuhkan dalam kurikulum ialah mendorong perkembangan pribadi yang meliputi perkembangan minat, berfikir dan kemampuan praktis. Inilah yang dimaksud Kilpatrick dengan istilah “*emerging curriculum*”, yang dalam pelaksanaannya memakai metode proyek.<sup>47</sup>

Kilpatrick dalam Arifin, mengatakan bahwa suatu kurikulum dianggap baik jika didasarkan pada tiga prinsip, yaitu: *pertama*, meningkatkan kualitas hidup anak didik pada tiap jenjang. *Kedua*, menjadikan kehidupan aktual anak ke arah perkembangan dalam suatu kehidupan yang bulat dan menyeluruh. *Ketiga*, mengembangkan aspek kreatif kehidupan sebagai suatu uji coba atas keberhasilan sekolah sehingga peserta didik dapat berkembang dalam kemampuannya yang aktual untuk aktif memikirkan hal-hal baru yang baik untuk diamalkan, dan dalam hal ini apa saja yang ingin berbuat serta kecakapan efektif untuk mengamalkan secara bijaksana melalui pertimbangan yang matang.<sup>48</sup>

Berdasarkan pendapat Kilpatrick tersebut maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan kurikulum pendidikan, yaitu: *pertama*, kurikulum harus dapat meningkatkan kualitas hidup peserta didik sesuai dengan jenjang pendidikan. *Kedua*, kurikulum yang dapat membina dan mengembangkan potensi peserta didik. *Ketiga*, kurikulum yang sanggup mengubah perilaku anak menjadi kreatif, adaptif dan kemandirian. *Keempat*, kurikulum bersifat fleksibel atau luwes berisi tentang berbagai macam bidang studi.

Dengan adanya berbagai macam bidang studi yang terintegrasi dalam satu unit, diharapkan peserta didik dapat berkembang secara fisik dan psikis dan dapat menjangkau aspek kognitif, afektif, maupun

---

bergerak dinamis diatas prinsip” *liberal road to culture*”. Lihat Noorsyam, *Filsafat Pendidikan*, hlm. 253.

<sup>46</sup>Iskandar Wiryokusumo dan Usman Mulyadi, *Dasar-dasar Pengembangan Kurikulum* (Jakarta: tp., 1988), hlm.68.

<sup>47</sup>Eksplorasi lebih lanjut lihat William H. Kilpatrick, *Philosophy of Education* (New York: Mac Millan Coy, 1957).

<sup>48</sup> Arifin, *Filsafat Pendidikan Islam*, hlm.93

psikomotorik. Dengan berlandaskan sekolah sambil berbuat inilah praktek kerja di laboratorium, di bengkel, di kebun merupakan kegiatan belajar yang dianjurkan dalam rangka terlaksananya *learning by doing* dan pemecahan masalah (*problem solving*).<sup>49</sup> Dalam hal ini filsafat progressivisme ingin membentuk keluaran (*out put*) yang dihasilkan dari pendidikan sekolah yang memiliki keahlian dan kecakapan yang langsung dapat diterapkan di masyarakat luas.

Untuk kepentingan ini, kurikulum diarahkan agar peserta didik bisa hidup sesuai dengan perkembangan nilai dan kultur yang berkembang di dalam masyarakat. Pendidikan adalah sebuah aktivitas dari suatu pembebasan, yakni pembebasan dari ketertinggalan, ketakutan, alienasi serta berbagai *social disease* lainnya. Bahkan lebih jauh, bahwa pendidikan harus mampu mempengaruhi proses perubahan sosial, dengan pengembangan nilai serta kultur yang dikehendaki untuk dikembangkan dalam bentuk berbagai pranata sosial oleh para peserta didiknya.<sup>50</sup>

Terpenuhinya misi pendidikan tersebut sangat tergantung pada kemampuan guru untuk menanamkan seting demokrasi pada peserta didiknya dengan memberi kesempatan seluas-luasnya pada peserta didik untuk belajar, yakni bahwa sekolah menjadi tempat yang nyaman bagi peserta didik untuk semaksimal mungkin mereka belajar. Sekolah bukan tempat pertunjukan bagi guru, tetapi tempat peserta didik untuk menambah dan memperkaya pengalaman belajarnya. Oleh sebab itu,

---

<sup>49</sup>Jalaluddin dan Abdullah Idi, *Filsafat Pendidikan*, hlm. 74. Bandingkan dengan Zuhairini, *Filsafat Pendidikan Islam*, hlm. 24. Dewey telah mengemukakan dan menerapkan metode *problem solving* ke dalam proses pendidikan, melakukan pembaharuan atau inovasi dari bentuk pengajaran tradisional di mana adanya verbalisme pendidikan. Di sini peserta didik dituntut untuk dapat memfungsikan akal dan kecerdasannya dengan jalan dihadapkan pada materi-materi pelajaran yang menantang siswa untuk terlibat aktif dalam proses belajar mengajar. Siswa dituntut dapat berfikir ilmiah seperti menganalisa, melakukan hipotesa dan menyimpulkannya dengan penekanannya terletak kepada kemampuan intelektualnya. Pengajaran dengan program ini, akan meniadakan batas-batas antara pelajaran yang satu dengan yang lain dan akan lebih memupuk semangat demokrasi pendidikan. Lihat Suparlan, *Aliran-aliran Baru dalam Pendidikan* (Yogyakarta: Andi Offset, 1988), hlm. 143.

<sup>50</sup>Dede Rosyada, *Paradigma Pendidikan Demokratis, Sebuah Model Pelibatan masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan* (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 43-44.

pendidik harus mampu mengembangkan strategi pembelajaran yang memberi peluang lebih besar bagi mereka untuk belajar. Sekolah harus menjadi *second home* bagi para peserta didik, mereka betah menghabiskan waktunya di sekolah dengan belajar, berdiskusi, menyelesaikan tugas-tugas kelompok, membaca dan aktivitas pembelajaran lainnya.<sup>51</sup>

Untuk mewujudkan hal tersebut, pendidik harus menolong peserta didik dalam menentukan dan memilih masalah-masalah yang bermakna, menemukan sumber-sumber data yang relevan, menafsirkan dan menilai akurasi data serta merumuskan kesimpulan. Pendidik harus mampu mengenali peserta didik, terutama pada saat apakah ia memerlukan bantuan khusus dalam suatu kegiatan, sehingga ia dapat meneruskan penelitiannya. Pendidik dituntut untuk sabar, fleksibel, berfikir interdisipliner, kreatif dan cerdas.<sup>52</sup>

Apabila konsep ini dilaksanakan, tentu akan menuntut fungsi pendidik sebagai fasilitator, dinamisator, mediator dan motivator, sehingga dapat memberdayakan peserta didik untuk mampu mencari dan menemukan sendiri informasi yang diterimanya. Pendidik berupaya menciptakan iklim belajar yang kondusif, sehingga peserta didik dapat belajar dalam suasana yang dialogis, harmonis dan demokratis.

## **Penutup**

Demokrasi pendidikan merupakan pendidikan hati nurani, artinya pendidikan yang lebih menghargai potensi manusia dikatakan lebih humanis dan beradab. Melalui demokrasi pendidikan akan terjadi proses kesetaraan antara pendidik dan peserta didik dalam proses pembelajaran. Dengan demikian, dalam proses pendidikan, perlu dikembangkan komunikasi struktural dan kultural antara pendidik dan peserta didik, sehingga akan terjadi interaksi yang sehat, wajar dan bertanggung jawab.

---

<sup>51</sup>John I. Goodlad, "Democracy, Education and Community", dalam *Democracy, Education and the School*, ed. Roger Soder (San Francisco: Jossey Bass, 1996), hlm. 113.

<sup>52</sup>Sadulloh, *Filsafat Pendidikan*, hlm. 148.

*Abd. Mukhid*

Sehubungan dengan hal tersebut, filsafat progresivisme telah memberikan sumbangan yang besar di dunia pendidikan dengan meletakkan dasar-dasar kemerdekaan dan kebebasan kepada anak didik, baik secara fisik maupun cara berfikir, guna mengembangkan bakat dan kemampuan yang terpendam dalam dirinya. Sebagai salah upaya menuju demokrasi pendidikan – dalam perspektif Tilaar - maka proses pendidikan harus mengembangkan kebebasan intelektual, kesempatan untuk bersaing, mengembangkan kepatuhan spiritual dan moral, pendidikan yang mengakui hak untuk berbeda dan percaya kepada kemampuan manusia. *Wa Allâh a'lam bi al-shawâb.\**